

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam menumbuhkan wirausaha Masyarakat

Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat sesuatu untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan.¹ Pengenalan pola bisa didefinisikan sebagai cabang kecerdasan yang menitikberatkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam kelas-kelas tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Terdapat pola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri yang harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan peraturan menteri dalam negeri tentang rencana kerja pemerintah daerah. Sistem pemerintahan Kabupaten Kediri dalam mengembangkan UMKM masyarakat melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) sebagai pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Besarnya program UKM dalam pengembangan ekonomi nasional telah mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi nasional dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang efisien bagi UKM. Pendekatan pemerintah terhadap masyarakat sangat diperlukan.

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola>, di akses pada hari sabtu, 2 Maret 2019

Pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk memacu pola pertumbuhan ekonomi diperlukan pengungkit ekonomi yang memiliki kekuatan yang sangat besar salah satunya adalah potensi daerah.²

Jiwa Kewirausahaan mempunyai keterkaitan besar dengan unsur inovasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat, guna menumbuhkan perkembangan UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka pola yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan UMKM Kabupaten Kediri meliputi Pelatihan Usaha dan Pemasaran UMKM yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pelatihan Usaha

Untuk menciptakan produk yang berdaya saing tinggi, maka salah satu strategi yang dilaksanakan antara lain melalui pemanfaatan keunggulan komparatif yang dimiliki karena tersedianya sumber daya alam dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sumber daya manusia.³

Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat adalah melalui pelatihan yang diadakan oleh pemerintah yaitu pembinaan yang dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap UKM.

²Tranggana Gani Putra, *Peran Pemerintah Daerah* Hlm.1

³ Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi.....* Hlm.29

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini pihak Dinas meminta data UKM dahulu ke kecamatan lalu melakukan survey lokasi, melihat potensi apa yang ada di daerah tersebut dengan kerja sama kepada kelompok masyarakat. Terdapat kelompok masyarakat yang meminta untuk diadakan kegiatan pelatihan usaha atas potensi daerah dan ada juga pihak Dinas yang mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kecamatan.

Salah satu usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memotivasi masyarakat agar mengikuti kegiatan berwirausaha adalah dengan cara pelatihan-pelatihan UKM untuk masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi SDM sehingga tercapai kinerja yang optimal dan tumbuh berkembang menjadi UMKM yang sehat, tangguh dan mandiri sebagai pelaku usaha. Berbagai pelatihan, dilakukan sekitar 3-4 hari. setiap pelatihan diikuti oleh 25-30 peserta, dan memperoleh subsidi dari pemerintah pusat kemudian turun ke pemerintah daerah selanjutnya diberikanya anggaran untuk Diskopusmik guna dialokasikan ke masyarakat. anggaran tersebut sebesar Rp 15.000.000 sampai Rp 20.000.000.

Dana tersebut dialokasikan sebagai biaya pendatangan narasumber, peralatan, perlengkapan dan konsumsi setiap hari untuk peserta, kemudian setiap peserta mendapatkan uang transport sebesar Rp. 70.000 setiap akhir penutupan kegiatan pelatihan dan sudah dikenakan pajak. Masyarakat sangat antusias terhadap

kegiatan tersebut, dan setiap kecamatan untuk beberapa desa selalu ada kegiatan pelatihan, terutama daerah yang belum terlihat maju yang merupakan tujuan dan perhatian utama pemerintah untuk memajukan perekonomian daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara dari beberapa pemilik UKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menyatakan bahwa kegiatan pelatihan ini sangat efisien dalam membangun jiwa kewirausahaan masyarakat. Sebab mereka merasa tergugah dan memiliki keinginan untuk selalu berinovasi dan selalu ingin mencoba. Meskipun tidak selalu semua peserta pelatihan yang menerapkan, namun kegiatan ini sangat memotivasi.

2. Pameran UKM

Saat mengenalkan produk UMKM ke masyarakat luas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri melakukan kegiatan pameran dan promosi bagi UKM. Dengan adanya pameran dan promosi ini UKM dapat memperluas pemasarannya serta memberikan peluang untuk bekerjasama yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Dalam hal ini kegiatan peningkatan promosi produk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu berupa kegiatan seperti bazar atau pameran UKM yang diadakan di tempat keramaian seperti kegiatan hari jadi Kabupaten Kediri yang biasanya dilaksanakan di Simpang Lima Gumul.

Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pasar.

Maka dari itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya melalui penyelenggaraan promosi produk UMKM adalah dengan melalui pengadaan pameran. Produk UMKM ini diharapkan kepada para pengelola di Kabupaten Kediri semakin aktif dan selektif dalam menampilkan produk-produknya dengan mutu, desain dan harga yang semakin bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Dinas dapat dikatakan telah maksimal.

Sebab dapat diketahui bahwa dalam pameran tersebut, produk-produk dari masyarakat kabupaten Kediri banyak yang meminati. Bahkan, dari pameran tersebut juga terjadi transaksi dengan jumlah yang cukup memuaskan, baik itu transaksi tunai maupun dalam bentuk pemesanan online. Sebab, Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Kediri juga memasarkan produk UKM masyarakat lewat media online. Berikut merupakan tabel pendapatan peningkatan UMKM masyarakat hasil binaan Diskopusmik yang dapat membuat masyarakat Kabupaten Kediri dan Pemerintah Daerah semakin maju dan berkembang demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita individu.

Untuk menunjang peningkatan dan perkembangan omset hasil UMKM di Kabupaten Kediri ini ada 2 jenis pameran. Yaitu pameran lokal yang diselenggarakan setiap bulan dan bergilir dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Kegiatan pameran lokal ini

mengutamakan pemilik UMKM yang berada di kecamatan sesuai dengan lokasi pameran pada saat itu. Sebagian baru UMKM milik masyarakat daerah lain yang masih dalam lingkup kabupaten Kediri. Dan segala acara, stand bazar, dll. Sudah ditanggung oleh Diskopusmik salah satunya.

Yang kedua adalah pameran secara mandiri. Pameran ini bersifat segala informasi dan pendaftaran melalui Diskopusmik namun segala biaya ditanggung sendiri. Biasanya pameran jenis ini merupakan pameran undangan dari daerah lain. Misalnya luar provinsi Jawa Timur yaitu Jakarta Expo. Namun pameran mandiri ini sangat jarang sekali. Apabila ada yang mengikuti itupun peserta UKM yang sudah berkembang usahanya agar produknya lebih dikenal masyarakat luar. Meskipun luar daerah, seringkali tidak terdapat pameran mandiri. Terkadang melalui jalur undangan tersebut teera mendapatt biaya transportasi, penginapan, dll. Jadi Tergantung sifat dari undangan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengenai pengembangan UMKM masyarakat dari berbagai jenis pameran baik UMKM yang mulai merintis usaha sampai yang sudah berjalan dengan baik usahanya, cukup menambah pendapatan mereka dengan menyesuaikan jenis pameran dengan kemampuan usaha yang mereka miliki.

Peningkatan UMKM yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri benar-benar terus dibina demi meningkatkan pertumbuhan bagi PDB

secara keseluruhan bagi Nasional. Pemberian pelatihan mulai dari pengelolaan manajemen keuangan hingga pemasaran ke market bagi UMKM merupakan tugas yang berat dijalankan oleh Pemerintah. Yang kedepannya dapat berkompetisi secara profesional serta mampu memberikan prekonomian nasional dengan lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Andhiny Paramasarai di Kota Surakarta yang menyatakan bahwa pengembangan UMKM diharapkan dapat berfungsi sebagai akar topang dalam pembangunan ekonmi, sehingga diperlukan usaha-usaha yang ditujukan untuk pengembangan UMKM. Rekomendasi yang diajukan penulis untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta adalah dengan ditambahnya kegiatan pelatihan penumbuhan jiwa kewirausahaan serta lebih memperbanyak kegiatan pameran agar produk lebih dikenal masyarakat. tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal.⁴

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saharudin.dkk mengenai pengembangan UKM di Kota Tanjungpinang. Fakta nyata tentang manfaat program UMKM di atas tidak berlangsung dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan terhadap pelaku usaha dengan skala kecil. Maka peran Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁴Dian Andhiny Paramasari, Skripsi “*Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda...*,”

(UMKM) harus dijalankan sebaik mungkin baik dari segi peranannya sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Namun masih ada beberapa program pemerintah yang harus dievaluasi karena tidak ada tindak lanjut dari program tersebut sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan UMKM.⁵

Namun untuk menjaga eksistensi UMKM masyarakat kabupaten Kediri ini merupakan segala sesuatu baik berupa materi maupun non materi yang dapat mendukung berjalannya program pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya sektor UMKM yang dibina dapat berjalan secara mandiri.

B. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi

Peran adalah sebuah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain.⁶ Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kembangkan UKM di daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. Peran ini diterapkan untuk mendukung usaha masyarakat, sehingga terbentuk UKM yang efisien dan membantu pendapatan perkapita individu serta dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran pemerintah Kabupaten Kediri khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) berusaha mengoptimalkan

⁵ Saharuddin, dkk. *Peran Pemerintah ...*(Jurnal)

⁶ Edy Sudarhono, *Teori Peran* Hlm.3

pengembangan UMKM dengan melakukan beberapa langkah baik dari segi meningkatkan kemampuan finansial dalam memperkuat permodalan, mengembangkan pemasaran agar omset penjualan semakin meningkat, perlunya mengembangkan sumber daya manusia Diskopusmik harus mengatur strategi pengaturan dan pengendalian seperti peningkatan kemudahan dalam pelayanan perijinan dan penguatan kelembagaan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Biddle dan Tomas yang membagi perstilaan teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dalam perilaku.⁷

Dari hasil wawancara dan observasi untuk mengimbangi pola-pola atau program UMKM yang di anggarkan pemerintah, maka peran yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagai Tugas, Pokok dan Fungsi peneliti menemukan diantaranya adalah

1. Fasilitator dan Pembinaan

Dalam konteks fasilitasi pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Dalam membantu UMKM yang harus mampu bersaing, pemerintah simpati dengan melakukan

⁷ Sarlito, Wirawan Sarwono, *teori-teori*Hlm.215

pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM dengan cara pembuatan aturan.⁸

Sebagai fasilitator dan pembina masyarakat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri memiliki peran dalam memfasilitasi UKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Jika UKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UKM dengan berbagai cara.

Jika UKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UKM menjadi tidak tergantung. Hal tersebut dilakukan pihak dinas atas dasar UKM yang menjadi binaan. Dalam konteks tersebut peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dapat berupa :

1. Penyaluran dana bergulir sebagai sumber permodalan masyarakat
2. penyediaan blangko PIRT
3. fasilitasi Kemenkop dan UKM RI sebagai Pengajuan HAKI baik pengajuan merk maupun lebel halal.
4. Pengajuan hak cipta produk UKM
5. Pengembangan usaha UKM baik wirausaha baru maupun branding product.

⁸ Tanggaran Gani Putra, Jurnal “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi..... Hlm.4

Pelayanan tersebut secara gratis di sediakan Dinas Koperasi dan Usaha Miro kabupaten Kediri dalam bidang produksi sebagai salah satu penunjang masyarakat demi mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun daerah. upaya-upaya yang dilakukan antara pihak Dinas kepada masyarakat di bawah binaan Dinas untuk mempermudah proses jalannya fasilitasi adalah: mempertemukan UKM dengan para pemilik dana, memberikan pelatihan pembukuan dan penyusunan studi kelayakan usaha atau proposal pengajuan dana.

2. Monitoring dan Evaluasi

Peran pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri setelah adanya kegiatan adalah Pemantauan terhadap peserta pelatihan UKM dengan cara peserta untuk praktik sendiri di rumah setelah itu hasilnya direkomendasikan ke pihak dinas. Bisa melakukannya melalui media sosial media maupun datang langsung ke Dinas, dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM dengan cara mengevaluasi kredit program yang dilakukan setiap bulan sekali dengan mengecek pembukuan hasil angsuran.

Pemantauan dilakukan dengan cara melihat penumbuhan inovasi produk baru dan keteraturan pembayaran angsuran. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar pengalaman yang di dapat oleh UKM dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan masyarakat tersebut.

Dengan adanya evaluasi program diharapkan pemerintah dapat menghasilkan suatu program peningkatan dan pemberdayaan UKM yang bersifat terstruktur, berkelanjutan dimasa yang akan datang. Selain itu dapat menyelaraskan struktur perencanaan nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional diatas 6% pertahun, mengurangi pengangguran, mmenurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

3. Pendampingan Usaha

Dari kelemahan yang dimiliki UKM, maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antar intansi.⁹

Pendampingan yang diperankan oleh Diskopusmik adalah memberikan pemahaman dan aktualisasi yang nyata untuk keberhasilan kegiatan untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku UKM di Kabupaten Kediri dengan melakukan pelatihan, bimbingan maupun fasilitasi bantuan informasi pemberian kredit perbankan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku UKM atau biasa disebut dengan pemberian dana bergulir.

⁹ Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil....* Hlm.27

Perhitungan dana yang diterima sebagai jasa pengelolaan Dana Bergulir Modal Kerja UMKM dan Koperasi sebesar 6%, digunakan untuk jasa operasional PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri sebesar 3%, dan untuk PAD sebesar 3% (50% jasa Bank dan 50% sebagai PAD). Hal tersebut sudah sesuai Nota Dinas Direksi PD. Bank Daerah Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2009 nomor 581/04/418.121/2009 perihal telaah peninjauan kembali susunan tim pengendali dan penyalur Program Kredit UMKM dan Koperasi serta Bunga Kredit dan Berita Acara rapat tanggal 26 Juni 2009 Nomor 581/ 04/ 048.121/2009.¹⁰

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sepriyono Nur di Kota Samarinda terkait peran pemerintah Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda.¹¹

Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi UKM yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dapat terealisasi dengan baik dan terutama tepat sasaran serta jelas fungsi dan tujuannya. Karena dapat membantu pelaku usaha kecil menengah memajukan dan memotivasi untuk mensukseskan usaha serta

¹⁰Keputusan Bupati Kediri, *Hasil Pelaksanaan Pemrograman Bergulir APBD Kabupaten Kediri*, 2018

¹¹Dwi Sepriyono Nur, Jurnal :*Peran Dinas Koperasi*

mensejahterakan kehidupan ekonominya, sehingga semakin lama maka akan banyak lapangan pekerjaan karena usaha yang dirintis telah maju pesat dan membutuhkan karyawan untuk direkrut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan Observasi, penelitian ini signifikan dalam memajukan UMKM Kabupaten Kediri, pemerintah antusias akan mengurangi tingkat pengangguran pula. Karena dari pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan maka akan menimbulkan kriminalitas yang tinggi dan banyak merugikan berbagai pihak. Jadi perlu dibuktikan keefektivitasan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri untuk menanggulangi resiko-resiko yang akan disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan keterbatasan biaya untuk pelatihan-pelatihan pengembangan keahlian bagi masyarakat kecil menengah. Untuk mewujudkan kapasitas pelaku UMKM yang baik maka perlu adanya bimbingan dan pendampingan serta arahan teknis maupun non teknis yang pada akhirnya pelaku usaha mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri dan memiliki daya saing demi mengembangkan usahanya jauh lebih baik. Meskipun tidak semua pemilik UMKM yang bersedia dibina Diskopusmik, namun mereka cukup mengikuti berbagai arahan dari Diskopusmik.

C. Kendala dan solusi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam Upaya Pengembangan UMKM

Kendala merupakan segala macam hal yang dapat menyebabkan jalannya kegiatan yang sudah dilaksanakan menjadi tidak efektif.¹² Maka diperlukan adanya tindakan untuk mengatasi kondisi yang merupakan penghalang bagi pengembangan UMKM Kabupaten Kediri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, diketahui bahwa dalam mengembangkan UMKM tidaklah berjalan lancar. Disisi lain terdapat kendala-kendala yang harus ditangani. Namun, terdapat peluang untuk mengantisipasi kendala tersebut.

Dalam penelitian kegiatan pengembangan UMKM oleh Dinas operasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ini memiliki kendala dan solusi diantaranya:

1. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

a) Kendala Internal

1) Minim Pemahaman dari Masyarakat

Para pelaku UMKM yang masih kurang dalam mengakses informasi menjadi salah satu masalah yang menyebabkan sulitnya fasilitas yang diberikan pemerintah. Informasi berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat diserap oleh para pelaku UMKM. Proses dalam memperoleh bantuan

¹² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konsepku Mensukseskan* Hlm.157

fasilitas perlu dipahami oleh para pelaku UMKM. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena para pelaku UMKM berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, bidang usaha yang berbeda dan skala bisnis yang berbeda.

Selain itu untuk proses validasi mengenai eksistensi dan aktivitas usaha yang dilakukan membutuhkan bukti berupa legalitas seperti izin P-IRT dari Dinas Kesehatan bagi bidang usaha kuliner, Halal label dari Majelis Ulama Indonesia dan BPOM bagi bidang usaha industri pengolahan bahan makanan mentah. Pemahaman tersebut yang sebenarnya masih kurang dimengerti oleh para pelaku UMKM dalam proses pengajuan fasilitas. Kebutuhan para pelaku UMKM bervariasi tergantung bidang usaha dan permasalahan yang dihadapi.

Proses pengajuan kebutuhan membutuhkan proses dan validasi mengenai eksistensi dan kebutuhan UMKM. Komunikasi antara pelaku UMKM dan fasilitator yang kurang jelas menjadi penghambat. Salah satu contohnya adalah ketidakjelasan dalam pengajuan kebutuhan dari pelaku UMKM hal tersebut disampaikan kepala bagian Usaha Mikro Dinas Koperasi.

2) Terbatasnya Jumlah Pegawai Penyuluh

Dukungan dari kekuatan kebersamaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sangat berpengaruh terhadap pembangunan SDM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kediri yang akan berdampak pada pelaksanaan penyuluhan pendidikan dan pelatihan usaha menjadi kurang optimal karena pada pelaksanaan pengembangan usaha kecil yang berupa pendidikan,

Pelatihan dan penyuluhan biasanya dilaksanakan oleh pegawai struktural yang sekaligus merangkap menjadi penyuluh. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu kendala serius bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Kediri.

b) Kendala Eksternal

a) Peraturan Pemerintah Pusat

Otonomi daerah diharapkan kedepannya menjadi suatu strategi yang bisa mendongkrak potensi-potensi daerah sehingga melahirkan masyarakat yang mandiri serta trampil dalam berkompetisi dalam bidang usaha didaerahnya masing-masing. Hal tersebut didukung dengan diadakanya pemberdayaan yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok pembawa perubahan dalam daerah tersebut.¹³

¹³ Muhamad Bagus Ferdiansyah, et.al, *Pemberdayaan Ekonomi*

Pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri merupakan strategi yang telah ditetapkan oleh kementerian pusat. Akan tetapi, tidak semua strategi yang ada diimplementasikan ditingkat pemerintahan Kabupaten Kediri. Karena harus disesuaikan dengan kondisi di daerah serta besarnya anggaran yang tersedia. Masyarakat UMKM juga terbatas pengetahunanya.

Hal ini mengakibatkan sulitnya pemerintah daerah untuk mengikuti aturan kementerian pusat. Sebab, apabila tetap memngikuti peraturan yang sedikit berlakunya lalu ganti aturan lagi maka masyarakat kecil dan minim pengetahuan yang akan kebingungan dan dapat mengakibatkan keterbelakangan perkembangan.

2. Solusi yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

1) Solusi Internal

a) Peran Asosiasi dari Kerjasama antar Lembaga

Peran ini merupakan solusi dari kendala minim pemahaman dari masarakat. Yang emerupakan asosiasi dalam mendukung kegiatan pengembangan UMKM yang memiliki kontribusi tinggi dalam upaya memberdayakan pelaku UMKM khususnya di kabupaten Kediri ini menciptakan kerjasama antar lembaga kecamatan setempat.

Hal tersebut nampak ketika Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri melakukan kegiatan pembinaan tidak mengalami kesulitan untuk menghubungi pelaku UMKM karena terdapat dukungan pendataan dari kecamatan setempat yang memantau apakah ada UMKM baru dan apakah UMKM tersebut masih aktif. Selanjutnya pihak Dinas, pengurus Kecamatan dan Kepala Desa tetap saling koordinasi dan kerjasama. Selain itu mungkin para pelaku UMKM terlibat dalam forum PKK (Pembina Kesejahteraan Usaha), Koperasi Usaha, Koperasi Wanita, Koperasi Potensi Lokal, dll.

b) Rekrutmen Pegawai Penyuluh

Proses rekrutmen tenaga penyuluh ini merupakan solusi dari kendala terbatasnya jumlah pegawai penyuluh. Berawal dari mahasiswa yang mengajukan beasiswa di perguruan tinggi salah satunya di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta melalui kementerian perindustrian. Yang mulanya, setelah lulus harus mengabdikan sebagai Tenaga Penyuluh Lapangan di Dinas Perindustrian daerah mahasiswa itu masing-masing selama dua tahun. Sistem pemerintahan di Kabupaten Kediri ini saling kerja sama dan mengkoordinasi apa yang menjadi kekurangan di setiap lembaga yang membutuhkan.

Terdapat sebagian mahasiswa tersebut yang direkrut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagai

Tenaga Penyuluh Lapangan setelah melalui beberapa tahap dan persyaratan tertentu.

2) Solusi Eksternal

a) Kebijakan tentang UMKM

Strategi pembuatan kebijakan ini merupakan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala peraturan dari pemerintah pusat yang cepat berubah. Bahwa yang dilakukan oleh Diskopusmik dimaksudkan untuk memperkuat jalannya UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman. Strategi ini didukung dengan kegiatan yang semestinya menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagai instansi pemerintah untuk menjembatani antara kemampuan masyarakat yang terbatas dengan peraturan dari pemerintah pusat yang cepat berubah. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Diskopusmik dapat mengimbangi seberapa besar kemampuan masyarakat dan perlahan masyarakat dibina untuk memajukan kegiatan UMKM nya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Rizkiany Nur di kecamatan Gebog kabupaten Kudus, menyatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan terdapat faktor penghambat yang menghambat jalannya UMKM namun memiliki faktor pendukung atau solusi sebagai celah untuk melancarkan kegiatan pemberdayaan UMKM. Faktor penghambat nya yaitu Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Terbatasnya Akses

Pemasaran, dan Terbatasnya Permodalan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu Tenaga Kerja yang Cukup Banyak dan Dukungan Dari Pihak-pihak Terkait.¹⁴

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat di Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam pengembangan UMKM, tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Karena potensi yang dimiliki masyarakat dalam suatu daerah mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian ini terdapat Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini.¹⁵ Permasalahannya terletak pada fasilitasi dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian adanya kendala di Diskopusmik ini dapat dikendalikan karena sudah memiliki solusi untuk mengantisipasi adanya hambatan yang terjadi. Dalam kegiatan jangka panjang masih dapat ditanggulang.

¹⁴ Ida Rizkiany Nur, Jurnal “*Peran Dinas Perindustrian, Koperasi Dan*”

¹⁵Feni Dwi Anggraeni, et. all., Jurnal “*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil*”